

## **DAMPAK PENGUATAN EKSPOR NON-MIGAS INDONESIA 2021 DAN TANTANGAN 2022**

Nidya Waras Sayekti

### Abstrak

*Selama tahun 2021, Indonesia mengalami surplus perdagangan migas dan non-migas. Surplus ini dikarenakan kinerja positif ekspor non-migas sebagai imbas kenaikan harga komoditas global. Penguatan kinerja ekspor non-migas 2021 berdampak pada kondisi perekonomian di dalam negeri berupa lonjakan harga minyak goreng bagi konsumsi dan kurangnya ketersediaan batubara bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Menghadapi permasalahan ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan terbatas untuk ekspor crude palm oil (CPO) dan subsidi minyak goreng satu harga. Surplus ekspor non-migas diproyeksikan akan terus berlanjut pada tahun 2022, namun masih dibayangi sejumlah tantangan. Tulisan ini mengkaji beberapa tantangan ekspor non-migas Indonesia tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor logistik serta isu lingkungan dan kesehatan menjadi tantangan terbesar. DPR RI perlu mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah khususnya di sektor ekspor non-migas. Selain itu, DPR RI melalui peran diplomasi parlemennya juga dapat menguatkan eksistensi produk non-migas Indonesia di forum internasional sehingga dapat menjaga nilai ekspor Indonesia.*

### Pendahuluan

Ekspor Indonesia sepanjang tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis total nilai surplus perdagangan migas dan non-migas Indonesia sepanjang tahun 2021 mencapai US\$35,34 miliar. Surplus ini tumbuh 38,82% dibandingkan tahun 2020, sebesar US\$21,62 miliar. Surplus neraca perdagangan ini tidak terlepas dari kinerja positif ekspor non-migas

sebagai imbas dari naiknya harga komoditas. Kenaikan ekspor yang lebih tinggi daripada kenaikan impor non-migas sebesar 34,05% mengantarkan Indonesia ke surplus neraca perdagangan tertinggi dalam 15 tahun terakhir yang sebelumnya terjadi tahun 2006 sebesar US\$39,37 miliar.

Lonjakan ekspor non-migas ini seiring langkah pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor melalui



hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam. Pemerintah menargetkan dominasi ekspor beralih ke barang setengah jadi dan berteknologi tinggi sebelum menuju optimalisasi ekspor untuk barang jadi. Hal ini tentu akan memacu nilai ekspor Indonesia. Di Tahun 2021, penyumbang ekspor terbesar adalah batubara serta industri pengolahan, yakni minyak sawit, besi, baja, otomotif, dan elektronik. Namun demikian, prestasi ekspor non-migas tahun 2021 masih dibayangi sejumlah tantangan. Tulisan ini mengkaji beberapa tantangan ekspor non-migas Indonesia tahun 2022. Dalam tulisan ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai dampak penguatan ekspor non-migas Indonesia tahun 2021 dan berbagai tantangan yang masih harus dihadapi selama tahun 2022.

### Ekspor Non-migas Indonesia

Selama tahun 2021, nilai ekspor non-migas Indonesia mencapai US\$219,26 miliar dengan

kontributor utama dari komoditas bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewan/nabati (Tabel 1).

Dalam *Outlook Perdagangan 2022*, indikasi semakin kuatnya ekspor bahan olahan tampak dari pencapaian ekspor non-migas sepanjang tahun 2021 yang berasal dari produk bahan bakar mineral, minyak kelapa sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) dan turunannya, besi dan baja, produk elektrik dan elektronika, serta kendaraan dan suku cadangnya. Total nilai ekspor bahan bakar mineral termasuk batubara tahun 2021 sekitar US\$32,83 miliar. Begitu juga dengan ekspor lemak dan minyak hewan/nabati, termasuk minyak kelapa sawit mentah, mencapai US\$32,83 miliar. Surplus perdagangan tahun 2021 dipengaruhi oleh lonjakan ekspor ke China, Amerika Serikat, India, Filipina, Taiwan hingga Australia. Khusus ekspor batubara senilai US\$26,54 miliar negara tujuan utamanya China, Jepang, dan India.

**Tabel 1. Nilai Ekspor Non-migas (US\$ juta)**

Komoditas	Nilai FOB*		Perubahan %	Peran Total Ekspor 2021 %
	2020	2021		
Bahan bakar mineral	17.255,1	32.836,3	90,30	14,98
Lemak & minyak hewan/nabati	20.716,4	32.831,7	58,48	14,97
Besi & baja	10.861,6	20.949,8	92,88	9,55
Mesin & perlengkapan elektrik	9.232,7	11.798,8	27,79	5,38
Berbagai produk kimia	3.795,9	6.905,4	81,92	3,15
Bijih logam, terak & abu	3.235,1	6.351,1	96,32	2,90
Logam mulia & perhiasan	8.222,5	5.417,7	-34,11	2,47
Nikel & barang daripadanya	808,4	1.284,5	58,89	0,59
Kakao & olahannya	1.244,2	1.207,8	-2,92	0,55
Pupuk	701,6	863,7	23,10	0,39
Lainnya	78.867,2	98.818,4	25,30	45,07
Total	154.940,7	219.265,2	41,52	100

\*Nilai FOB: Nilai *Free on Board* (Harga Barang)

Sumber: *Bisnis Indonesia*, 19 Januari 2022.

## Dampak Kenaikan Harga Komoditas

Sepanjang tahun 2021, harga rata-rata CPO di atas US\$1.000 per ton, bahkan mencapai puncak tertinggi yaitu US\$1.390 per ton pada Oktober 2021. Begitu juga dengan batubara yang harganya meningkat 85,63% selama tahun 2021 dan ditutup dengan harga US\$151,75 per ton. Kenaikan harga CPO dan batubara tersebut telah memberikan dampak bagi ekonomi nasional.

Dampak dari kenaikan harga CPO global mengakibatkan harga minyak goreng di dalam negeri melonjak tinggi. Minyak goreng curah dan kemasan yang semula seharga Rp9.500-Rp12.500 per liter melonjak menjadi Rp17.500-Rp21.000 per liter. Langkah solutif dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui kebijakan larangan terbatas pada ekspor sejumlah produk kelapa sawit untuk memastikan ketersediaannya bagi pasar dalam negeri. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Permendag ini mulai berlaku pada 24 Januari 2022.

Kebijakan larangan terbatas (Lartas) pada produk minyak sawit diterapkan untuk memastikan pasokan minyak sawit untuk pemenuhan minyak goreng di dalam negeri terpenuhi dan tidak adanya kebocoran minyak goreng subsidi ke luar negeri (diekspor). Pemerintah berencana akan memakai dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

(BPDPKS) senilai Rp3,6 triliun untuk penyediaan 1,2 miliar liter minyak goreng yang akan dijual dengan satu harga yakni sebesar Rp14.000 per liter. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dengan menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. Kebijakan ini didasarkan juga atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat.

Sementara itu, kenaikan harga batubara global membuat sebagian besar eksportir batubara lebih memilih mengeksport batubara daripada memenuhi kebutuhan pasar domestik. Hal ini menyebabkan pasokan batubara di dalam negeri berkurang pada awal tahun 2022, terutama untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Guna menghindari kondisi krisis ke depan, Ditjen Ketenagalistrikan bersama dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM terus mengawal proses pengiriman batubara khususnya untuk 17 PLTU yang sempat mengalami kekurangan pasokan tersebut. Saat ini, kondisinya telah lebih baik dengan hari operasional (HOP) yang telah melebihi rata-rata.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, sepanjang perdagangan tahun 2021, Indonesia memang diuntungkan oleh siklus super (*supercycle*) komoditas. Dalam siklus itu, lonjakan harga sejumlah komoditas global, terutama CPO dan batubara terjadi sehingga Indonesia mendapatkan berkah dari ekspor kedua komoditas tersebut. Sementara terkait krisis

energi, jika energi masih tinggi, maka dapat mengancam pemulihan ekonomi global termasuk Indonesia. Menghadapi hal ini, solusi yang dapat dilakukan yaitu memperkuat perdagangan multilateral melalui forum G-20 (Kompas, 18 Januari 2021).

### Isu Lingkungan

Isu lingkungan kerap menjadi senjata negara-negara Eropa untuk menolak produk CPO Indonesia. Mulai dari proses penanaman yang dinilai merusak hutan hingga isu kesehatan terhadap produk minyak sawit tersebut. Langkah persuasif dan represif perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut sehingga neraca perdagangan nasional tetap surplus misalnya melalui jalur diplomatik. Para diplomat harus menjadi ujung tombak dalam memberikan penjelasan kepada mitra dagang. Terbukti beberapa negara di Eropa bisa menerima produk CPO. Hal ini akan membawa sentimen positif bagi negara lain untuk menerima produk minyak sawit tersebut. Sedangkan langkah represif yakni dengan melakukan perlawanan terhadap hambatan dagang yang dilakukan sejumlah negara dengan menyiapkan pengacara andal untuk mematahkan tuduhan dan tuntutan negara mitra dagang.

Langkah penting lainnya adalah percepatan hilirisasi komoditas pada produk-produk lainnya sehingga ekspor produk jadi lebih banyak menghasilkan devisa. Memang langkah mengubah ekspor produk mentah menjadi barang jadi tidak mudah. Apalagi budaya menjual barang mentah ini terjadi sejak penjajahan Belanda. Namun, hal itu keniscayaan yang bisa

diupayakan secara bersama-sama.

### Tantangan Ekspor Non-Migas ke Depan

Kinerja perdagangan pada tahun 2022 diproyeksikan akan terus positif meskipun sejumlah tantangan masih harus dihadapi antara lain masih terganggu dan tingginya biaya logistik laut, melonjaknya harga sejumlah komoditas global, krisis energi dan divergensi ekonomi global (Kompas, 18 Januari 2021). Di sektor logistik, jika penyumbatan di berbagai pelabuhan dunia tidak segera diselesaikan, perdagangan akan terhambat. Gangguan dan lonjakan biaya logistik laut global telah menyebabkan Indonesia kekurangan kapal dan peti kemas. Biaya logistik antarpulau di Indonesia juga turut naik.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (GPKSI), Joko Supriyono, memperkirakan volume ekspor produk kelapa sawit akan lebih tinggi daripada tahun 2021 seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi. Namun demikian, ekspor produk kelapa sawit menghadapi tantangan logistik berupa kenaikan biaya pengapalan, meskipun ekspor produk kelapa sawit tidak banyak tergantung dengan ketersediaan *container*, dikarenakan 85% produk yang diekspor telah berbentuk produk olahan.

Biaya logistik diperkirakan tetap akan tinggi hingga akhir tahun 2022 dikarenakan pandemi Covid-19 masih berlanjut. Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD) memproyeksikan jika tarif logistik tetap tinggi hingga tahun 2023,

maka tingkat harga impor global dan tingkat harga konsumen dapat naik masing-masing sebesar 10,6% dan 1,5%.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menyampaikan untuk mengatasi permasalahan logistik global diperlukan kebersamaan *stakeholder* dalam mengurangi beban dari naiknya biaya logistik. Kadin Indonesia terus menjalin koordinasi dengan *Indonesian Trade Promotion Center* di luar negeri untuk memastikan penetrasi produk Indonesia dapat terus meningkat, terutama di negara mitra yang telah menjalin kerja sama perdagangan (Kompas, 19 Januari 2021).

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Mohamad Ikhsan, mengingatkan bahwa biaya logistik dapat menjadi batu sandungan guna memacu ekspor dan impor nasional pada tahun ini. Padahal Kementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 7,2% pada tahun 2022 seperti tertuang dalam Permendag No. 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024. Sebagai salah satu upaya pencapaian target tersebut, pemerintah perlu melakukan evaluasi perjanjian perdagangan yang telah dibuat baik bilateral maupun multilateral untuk menstabilkan penguatan nilai ekspor Indonesia.

### **Penutup**

Penguatan nilai ekspor non-migas selama tahun 2021 telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional melalui surplus perdagangan Indonesia. Penguatan ekspor non-migas

juga telah memberikan dampak bagi perekonomian dalam negeri akibat kenaikan harga minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan batubara dengan meningkatnya harga minyak goreng dan kelangkaan *supply* batubara bagi PLTU. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan terbatas ekspor produk minyak sawit untuk menjamin ketersediaan minyak goreng bagi konsumsi di dalam negeri dengan harga subsidi (satu harga). Pemerintah juga mengawal distribusi batubara untuk memastikan *supply* ke PLTU tidak terhambat.

Kinerja ekspor non-migas diproyeksikan masih akan terus tumbuh positif pada tahun 2022 meskipun sejumlah tantangan masih terus harus dihadapi, seperti masalah logistik serta isu lingkungan dan kesehatan atas produk CPO di luar negeri yang dapat menghambat ekspor non-migas tahun 2022. Upaya melalui jalur diplomatik perlu terus dilakukan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekspor non-migas di 2022. DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan melalui Komisi VI perlu melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan pemerintah di sektor ekspor khususnya non-migas. Selain itu, DPR RI melalui peran diplomasi parlemennya juga dapat menguatkan eksistensi produk non-migas Indonesia di forum internasional sehingga dapat menjaga nilai ekspor Indonesia.

### **Referensi**

“Ekspor Hadapi Tantangan”,  
*Kompas*, 18 Januari 2022, hal. 10.

“Ekspor Kembali Melaju”, *Bisnis Indonesia*, 19 Januari 2022, hal. 4.  
“Kemendag Atur Larangan Terbatas”, *Bisnis Indonesia*, 19 Januari 2022, hal. 2.  
“Mempertahankan Surplus Dagang”, *Bisnis Indonesia*, 19 Januari 2022, hal. 2.

“Transformasi Ekspor Menguat”, *Bisnis Indonesia*, 19 Januari 2022, hal. 1.



Nidya Waras Sayekti  
[nidya.sayekti@dpr.go.id](mailto:nidya.sayekti@dpr.go.id)

Nidya Waras Sayekti, SE., MM., menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Mercu Buana tahun 2006. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Potensi dan Regulasi Fintech di Indonesia” (2018), “Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah di Indonesia” (2019), dan “Permasalahan Ekonomi Nelayan dan Upaya Pemberdayaannya” (2019), “Upaya Pengembangan Logistik Halal di Indonesia” (2020).

---

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.